

LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Jenis : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Perhimpunan Dokter Hewan Seluruh Indonesia
Sifat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 25 Januari 2007
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara : Membicarakan masalah flu burung di Indonesia
Ketua Rapat : Dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Surjadi / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir : 35 Anggota dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI,
12 orang Ijin.

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan Perhimpunan Dokter Hewan Seluruh Indonesia pukul 14.40 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK PEMBICARAAN

Perkenalan mengenai organisasi profesi dokter hewan atau Indonesian Veterinary Medical Association. Profesi ini dikenal sebagai profesi veteriner dimana veteriner adalah terminology global yang berarti segala urusan mengenai hewan dan penyakit-penyakitnya serta berbagai aspek yang terakit dengan hal ini

Penyakit flu burung disebabkan oleh virus avian influenza yang awalnya hanya bersifat ganas dan mematikan bagi unggas khususnya ayam. Penelitian tentang virus ini yang ternyata juga dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan kematian manusia masih terus berlangsung dan berkembang hingga saat ini masih belum dapat menetapkan hal-hal prinsip yang paling tepat menurut ilmu kedokteran. Pengendalian virus sebagai kuman penyakit yang dapat membahayakan hewan dan manusia pada intinya adalah tindakan memutus mata rantai penularan dari hewan ke manusia, melalui pendidikan tentang higienis dan sanitasi dalam kehidupan manusia sehari-hari,. Implementasi higienis dan sanitasi sangat sulit dilakukan pada lingkungan pemukiman yang padat masyarakat yang miskin dan tidak berpendidikan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 15 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas telah menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Hal ini akan diikuti oleh provinsi yang lain sebagaimana dianjurkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Menteri Kesehatan pada Rakor Kesra Penanganan flu burung di kantor Menteri Kesehatan tanggal 15 Januari 2007 menindak lanjuti diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kebijakan pemerintah yang gencar diberitakan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat umum dan mengakibatkan pula kerugian ekonomi yang luar biasa. Eskalasi pemberitaan yang kurang tepat karena bukan oleh ahlinya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap unggas yang dinyakini dapat menularkan penyakit sehingga masyarakat memusuhi keberadaan unggas.

Adanya pemberitaan yang terus menerus mengenai pasien-pasien manusia yang suspect flu burung yang dirujuk ke rumah sakit dengan gejala panas tinggi dan gangguan respirasi yang belum dipastikan flu burung pada kenyataannya langsung ditindak lanjuti dengan pembasmian unggas disekitarnya. Dari 251 pasien yang dirujuk ternyata negative flu burung namun dapat dibayangkan tindakan pembasmian unggas disekitar 251 titik pasien suspect telah menghabiskan keberadaan unggas yang belum/tidak layak dibasmi.

Mengatasi kepanikan akibat adanya kebijakan berkenaan penyakit flu burung :

1. Ada 3 unsur pokok yang menjadi focus Penanganan dalam rangka mengatasi penyakit AI bersumber unggas :
 - a. Manusia
Diperlukan pendidikan yang tepat kepada masyarakat mengenai higienis, sanitasi dan pengenalan sumber penularan penyakit yang harus dihindari atau diamankan seperti feces (kotoran unggas), leleran hidung dan mata, penanganan limbah pemotongan ayam, cara memperlakukan ayam sakit dan ayam mati
 - b. Hewan/unggas
Tata cara pemeliharaan sesuai dengan jenis spesies unggas, bersifat tidak pukul rata
 - c. Lingkungan
Pengaturan lokasi dikaitkan dengan kepadatan penduduk dan status wilayah (perkotaan, desa dan sebagainya)
2. Kehati-hatian dalam meluncurkan hasil kajian ilmiah yang belum memperoleh kepastian ilmiah kepada masyarakat awam melalui media massa yang mengakibatkan salah persepsi dan kepanikan baru sehingga memicu terjadinya tindakan-tindakan tak tercontrol dari masyarakat yang dapat merugikan.
3. Pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat agar diimbau tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bukan bidang keahliannya ataupun kewenangannya karena dapat mempengaruhi *opini public* yang belum tentu benar dan sulit untuk memulihkan.
4. Pemberitaan media massa seyogyanya disertai dengan pemahaman tentang penyakit hewan dan menampilkan ahli-ahli penyakit hewan yang tepat karena merupakan keahlian khusus yang sangat bervariasi di bidang kedokteran hewan.

Rekomendasi PB PDHI sebagai profesi veteriner

1. Dalam mengatasi kepanikan masyarakat, semua pihak yang bertanggung jawab agar saling menghormati dan bekerja sama mengingat flu burung/avian influenza adalah zoonosis.
2. Kerja sama di bidang keilmiahan di bidang kesehatan manusia dan kesehatan hewan harus selalu dilaksanakan bersama-sama dan berkelanjutan agar kejelasan kasus flu burung/avian influenza pada manusia dan hewan terutama menyangkut moda penularan dari hewan ke manusia di Indonesia menjadi lebih jelas.
3. Pemutusan mata rantai penyakit flu burung dari unggas ke manusia dapat dilaksanakan apabila telah ada kejelasan moda penularan penyakit tersebut.
4. Perlu penegakan aturan yang kuat dari pemberlakuan sanksi-sanksi dalam upaya penyedalian penyakit untuk keselamatan masyarakat.
5. Dalam penanganan AI untuk memenuhi kebutuhan tenaga/sumberdaya manusia veteriner/kesehatan hewan diseluruh wilayah negara harus sejalan dengan aturan rekrutmen dan pemberdayaan sesuai keahliannya di bidang penyakit hewan.
6. penjelasan yang tegas dan sederhana bahwa pangan asal unggas bukan menular/penyebab penyakit sehingga takut mengkomsumsi pangan asal unggas adalah pemahaman yang salah

III. RANGKUMAN

Setelah mendengarkan pertanyaan/saran dan harapan Anggota serta jawaban dari Perhimpunan Dokter Hewan Seluruh maka sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat menyampaikan dan membacakan rangkuman rapat sebagai berikut :

- Bahwa masukan-masukan dari Perhimpunan Dokter Hewan Seluruh Indonesia akan dijadikan sebagai bahan masukan Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan.
- Supaya PDHI punya modul bagaimana cara untuk *to cut the transmision of decies* seperti yang dilakukan di Hongkong untuk SARSnya dan di Korea untuk flu burungnya.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 24 Januari 2007
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Ketua,

Dr. Ribka Tjiptaning

